

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Shophan Tornasi dan Muhammad Hendri Yanova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal*, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo, 1996.
- Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021.
- Didik Endo Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2015.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. Manhaji Medan, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang : Madza Media, 2021.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Lusia Sulastri, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1980.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo : Penerbit Zifatama Jawara, 2018.
Tolib Effendi, *Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014.
Pedoman Metode Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan,
Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta
Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel

C. Jurnal

Abdul Azis, *Keabsahan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pamulang Law Review Volume 4 Issue 2 , November 2021, hlm. 127-136
Bahran, *Penetapan Tersangka menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 226.
Dodik Hartono, dkk. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 53-64.
Effendi, E, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 2020, hlm. 267–288.

- Ernest Sengi, *Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob)*, Wajah Hukum Vol. 6 (2), Oktober 2022, hlm. 232-240.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Kajian dan Anotasi Putusan 1 : Ius Constitum vs Ius Constituendum Anotasi Putusan Perkara Sno. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*, Dictum Edisi 11 - November 2015, hlm. 3.
- Nardiman, *Praperadilan setelah Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2014*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018, hlm. 41.
- Rishma Yuristia, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Pengajuan Praperadilan mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai Tersangka*, Jurnal Verstek Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 183-184.
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, *Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka*, Jurnal IBLAM Law Review, 2024, hlm. 479.
- Rudy Cahya Kurniawan, *Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 12 No. 3 Desember 2018, hlm. 37.
- Supramono Linggama, *Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan berkaitan dengan Masalah Penahanan bagi Tersangka oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981*, Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 116
- Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Hlm. 4
- Valentine Masinabow, dkk., *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 11 No. 2 (2023).
- Winy Savitri dan Frans Simangunsong, *Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance V ol. 3 No. 1 Januari - April 2023, hlm. 90

D. Internet

- <https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Senin, 22 September 2024, Pukul 15.15 WIB.
- Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK*, artikel, diakses pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%20Putusan%20MK.pdf>
- Jan Hoesada, *Istilah Pertimbangan dalam Khasanah Hukum NKRI*, Artikel, hlm. 6.

